



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2004

**STUDI PENGENDALIAN INFLASI SEBAGAI SASARAN AKHIR
KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA
(SUATU PARADIGMA BARU)**

Peneliti:

Drs.Ec.Bustani Berachim
Nurul Istifadah, SE.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi

DIP Nomor : 004/XXIII/1/--/2004 Tanggal 3 Januari 2004

Kontrak Nomor : 108/P2IPT/DPPM/DM, SKW/III/2004

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 60.

PUSLIT PEMBANGUNAN REGIONAL

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004

012706141

- INFLATION (FINANCE)
- MONETARY POLICY



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2004

LP 127/06
Ber
S

**STUDI PENGENDALIAN INFLASI SEBAGAI SASARAN AKHIR
KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA
(SUATU PARADIGMA BARU)**

Peneliti:

Drs.Ec.Bustani Berachim
Nurul Istifadah, SE.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi

DIP Nomor : 004/XXIII/1/--/2004 Tanggal 3 Januari 2004

Kontrak Nomor : 108/P2IPT/DPPM/DM, SKW/III/2004

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 60.

012706141

PUSLIT PEMBANGUNAN REGIONAL

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Judul Penelitian
SEBAGAI | : STUDI PENGENDALIAN INFLASI

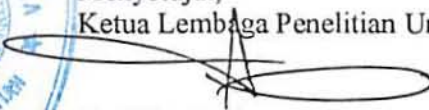
SASARAN AKHIR KEBIJAKAN
MONETER DI INDONESIA (Suatu
Paradigma Baru) |
| b. Kategori Penelitian | : I/II/III |
| 2. Ketua Peneliti | : |
| a. Nama lengkap | : Drs. Ec. Bustani berachim |
| b. Jenis kelamin | : L.aki-laki |
| c. Golongan/Pangkat/NIP | : IVa / Lektor / 130 541 0823 |
| d. Jabatan Fungsional | : Dosen Tetap Fak. Ekonomi Unair |
| e. Fakultas / Jurusan | : Fak. Ekonomi Studi Pembangunan |
| f. Pusat Penelitian | : Lembaga Penelitian Universitas Airlangga |
| g. Bidang Ilmu yang Diteliti | : Ekonomi Moneter |
| 3. Jumlah Tim Peneliti | : 2 (dua) orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : Nasional / Indonesia |
| 5. Kerjasama dengan Instansi lain | : Bank Indonesia, Kantor Statistik |
| 6. Lama Penelitian | : 5 (lima) bulan |
| 7. Biaya yang diperlukan | : Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) |

Mengetahui,
Ketua Psilit Pembangunan Regional


Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, MSc.
NIP 131 541 826

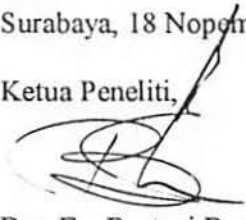


Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Unair


Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

Surabaya, 18 Nopember 2004

Ketua Peneliti,


Drs. Ec. Bustani Berachim.
NIP 130 541 823

RINGKASAN**STUDI PENGENDALIAN INFLASI SEBAGAI SASARAN AKHIR
KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA
(Suatu Paradigma Baru)**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan membuktikan perbedaan kebijakan moneter yang berorientasi jumlah uang yang beredar dan yang berorientasi pengendalian inflasi; (2) menganalisis dan membuktikan model kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam mengatasi laju inflasi yang tinggi; (3) menganalisis dan membuktikan dampak dari kebijakan moneter yang berorientasi pengendalian inflasi terhadap kestabilan perekonomian; (4) menganalisis dan membuktikan kebijakan ekonomi moneter yang diterapkan selama ini apakah perlu mengalihkan sasaran akhirnya dari pengendalian jumlah uang yang beredar dan penentuan tingkat suku bunga kepada sasaran akhir berupa pengendalian laju inflasi sebagai upaya terpeliharanya stabilitas harga.

Semakin meningkatnya perekonomian (indikator PDB) terdapat kecenderungan semakin meningkat pula jumlah uang beredar dan laju inflasi. Pada tahun 1999 jumlah uang beredar di Indonesia jauh lebih banyak dari unit output, sehingga terjadi inflasi. Dampak dari kebijakan moneter yang berorientasi pengendalian inflasi adalah mengurangi jumlah uang beredar agar tercapai kestabilan perekonomian, yaitu keseimbangan di sektor riil dan keseimbangan di sektor moneter.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah uang beredar adalah kebijakan moneter yang bertujuan secara tidak langsung untuk mengendalikan inflasi, sedangkan kebijakan moneter yang bertujuan akhir pengendalian inflasi adalah kebijakan moneter yang dilakukan dengan mengendalikan penyebab inflasi; (2) Kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam mengatasi laju inflasi adalah kebijakan moneter yang bertujuan langsung dan bertujuan antara dalam mengendalikan laju inflasi; (3) Jumlah uang beredar serta naik turunnya tingkat suku bunga dapat

berakibat pada perubahan laju inflasi di Indonesia. Sehingga kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebaiknya ditujukan langsung kepada penyebab inflasi (*inflation targeting*) seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, nilai tukar, hutang swasta dan hutang pemerintah terhadap pihak luar negeri, serta sebab-sebab lain di luar bidang moneter, seperti permasalahan di sektor riil.

(Pusat Penelitian Pembangunan Regional, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Kontrak Nomor : 108/P4T/DPPM/DM, SKW/III/2004)

KATA PENGANTAR

Syukur Alkhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat disusun dan diselesaikan.

Atas dorongan dan bimbingan serta bantuan berbagai pihak, saya ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Sarmanu, M.S. selaku ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan penelitian ini .
2. Suami saya mas Andrys dan Ananda Airlangga Kharisma Bijaksana, Airlando Kreatif Bestara, dan Angelinasyarga Sutera Dewangga yang telah memberikan dorongan, semangat dan pengertiannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini
3. Serta pihak-pihak yang tidak bisa saya menyebutnya satu per satu yang telah secara langsung maupun tidak langsung membantu sehingga laporan penelitian ini dapat terwujud.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan penelitian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya senantiasa membuka diri terhadap saran dan kritik membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Semoga laporan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi diri saya khususnya dan pembaca umumnya.

Surabaya, 18 November 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN		ii
RINGKASAN		iii
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GAMBAR / ILUSTRASI		viii
DAFTAR LAMPIRAN		ix
I. PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang Masalah		1
1.2 Perumusan Masalah		2
II. TINJAUAN PUSTAKA		3
2.1 Definisi dan Pengertian Inflasi		3
2.2 Pengaruh Kebijakan Moneter (Monetary Policy) Terhadap Pengeluaran Agregat Pendapatan Nasional dan Tingkat Harga		7
2.3 Uang		9
2.4 Teori Permintaan Uang		13
2.5 Mata Uang Dalam Peredaran dan Uang Beredar		16
2.6 Proses Penciptaan Uang oleh Bank Umum		18
2.7 Bank Sentral		22
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN		27
3.1 Tujuan Penelitian		27
3.2 Manfaat Penelitian		27
IV. METODE PENELITIAN		28
4.1 Pendekatan Penelitian		28
4.2 Definisi Operasional		28
4.3 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data		28
4.4 Tehnik Analisis Data		29
V. HASIL DAN PEMBAHASAN		30
5.1 Deskripsi Hasil		30

5.1.1	Uang beredar di Indonesia	30
5.1.2	Laju inflasi dan cara perhitungannya di Indonesia	36
5.1.3	Bank Indonesia	45
5.2	Pembahasan	47
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	55
6.1	Kesimpulan	55
6.2	Saran-saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN	58
1.	Personalia dan Organisasi Penelitian	58
2.	Riwayat Hidup Ketua Peneliti	59
3.	Riwayat Hidup Peneliti	60

DAFTAR TABEL

5.1	Uang Beredar (M1) di Indonesia, Tahun 1981 – 2004 (Dalam Milliar Rupiah)	31
5.2	Uang Beredar M ₁ dan M ₂ di Indonesia Tahun 1970 – 1993 (Dalam Milyar Rupiah)	35
5.3	Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 27 Kota di Indonesia Tahun 1994 – 1998	38
5.4	Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) di Indonesia, Tahun 1995 – 1998	39
5.5	Cara Perhitungan Inflasi dengan Menggunakan PDB Deflator Tahun 1990 – 1998	40
5.6	Laju Inflasi Beberapa Kota 17 Kota di Indonesia	43
5.7	Perkembangan Status dan Fungsi Pokok Bank Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Sentral	46
5.8	Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 1970 – 1999	49
5.9	Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Output dan Tingkat Bunga	53
5.10	Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia, Tahun 1984 – 2004	54

DAFTAR GAMBAR

5.1	Uang Kartal dan Uang Giral, Tahun 1981-2004	32
5.2	Persentase Uang Kartal dan Uang Giral, Diagram Area, Tahun 1981 – 2004	33
5.3	Laju Inflasi Beberapa Kota di Indonesia, Diagram Garis, Tahun 1984 – 2004	44
5.4	Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian	52
5.5	Kurva Estimasi Linear antara Jumlah Uang Beredar dan Laju Inflasi di Indonesia	55

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 **Personalia dan Organisasi Penelitian**
- 2 **Riwayat Hidup Ketua Peneliti**
- 3 **Riwayat Hidup Peneliti**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya. Masalah-masalah tersebut antara lain : menstabilkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi. Sedangkan kebijakan yang dapat dijalankan dibedakan dalam tiga bentuk kebijakan, yaitu : kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran (Sukirno, 2002 : 25),

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke arah kondisi yang diinginkan dengan lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sasaran akhirnya adalah meningkatnya output keseimbangan dan tercapainya stabilisasi harga dimana laju inflasi dapat dikendalikan. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar sebagai upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi (Rahardja, 2001; 359) \

Menurut Sadono Sukirno kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah – yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia – untuk mempengaruhi (merubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (Sukirno, 2002; 26) .

Kebijakan moneter dikatakan efektif bila mampu mengendalikan tingkat output dan atau harga. (Rahardja, 2001; 362) *Sehingga untuk mencapai sasaran akhir / tujuan makro stabilisasi harga maka kebijakan moneter yang diterapkan secara langsung harus berorientasi pada usaha pengendalian laju inflasi dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan upaya pengaturan jumlah uang yang beredar hanyalah merupakan sasaran antara. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar merupakan upaya*

untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian sehingga berdampak pada keseimbangan di pasar uang dan pada akhirnya akan berpengaruh pada laju inflasi.

Munculnya paradigma baru tentang arah kebijakan moneter dimana tidak lagi berorientasi pada sasaran antara yaitu mengatur jumlah uang beredar, tetapi lebih berorientasi pada sasaran akhir berupa pengendalian inflasi atau stabilisasi harga, maka perlu kajian lebih mendalam tentang paradigma baru kebijakan moneter tersebut. Dengan perubahan paradigma kebijakan moneter tersebut maka akan ada beberapa perubahan dan dampak dari kebijakan moneter yang memerlukan kajian lebih mendalam.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan kebijakan moneter yang berorientasi jumlah uang yang beredar dan yang berorientasi pengendalian inflasi.
2. Kebijakan moneter yang bagaimana yang dapat diterapkan dalam mengatasi laju inflasi yang tinggi
3. Apakah dampak dari kebijakan moneter yang berorientasi pengendalian inflasi terhadap kestabilan perekonomian.
4. Apakah kebijakan ekonomi moneter yang diterapkan selama ini perlu mengalihkan sasaran akhirnya dari pengendalian jumlah uang yang beredar dan penentuan tingkat suku bunga kepada sasaran akhir berupa pengendalian laju inflasi sebagai upaya terpeliharanya stabilitas harga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Pengertian Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga yang umum. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu (1) kenaikan harga, (2) bersifat umum, dan (3) berlangsung terus menerus.

Tingkat inflasi (persentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, satu barang dengan barang lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain.

Laju inflasi adalah tingkat perubahan harga umum dan diukur sebagai berikut :

$$\text{Laju inflasi tahun } (t) = \frac{\text{tingkat harga } (th_t) - \text{tingkat harga } (th_{t-1})}{\text{Tingkat harga } (tahun_{t-1})}$$

Tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam praktek berupa indeks harga, yaitu rata-rata harga konsumen atau produsen (IHK atau IHP).

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya sekelompok barang-barang dan jasa-jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, pemukiman, transportasi, kesehatan, dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Indeks harga dibuat dengan menimbang setiap harga sesuai dengan arti penting secara ekonomis dari komoditi yang bersangkutan -- menimbang secara proporsional terhadap pengeluaran keseluruhan konsumen pada jenis barang tersebut (melalui survey pengeluaran konsumen).

Indeks Harga Produsen (IHP) mengukur tingkat harga pada tingkat harga produsen atau pedagang besar. Timbangan tetap yang digunakan untuk menghitung IHP adalah penjualan bersih komoditi. Rahardja (2001) menyebutnya sebagai Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHP atau IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab dilihat dari metode penghitungannya kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataan jenis barang yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu. Demikian juga kegiatan ekonomi juga tidak terjadi di beberapa kota saja melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (*GDP deflator*) atau IHI

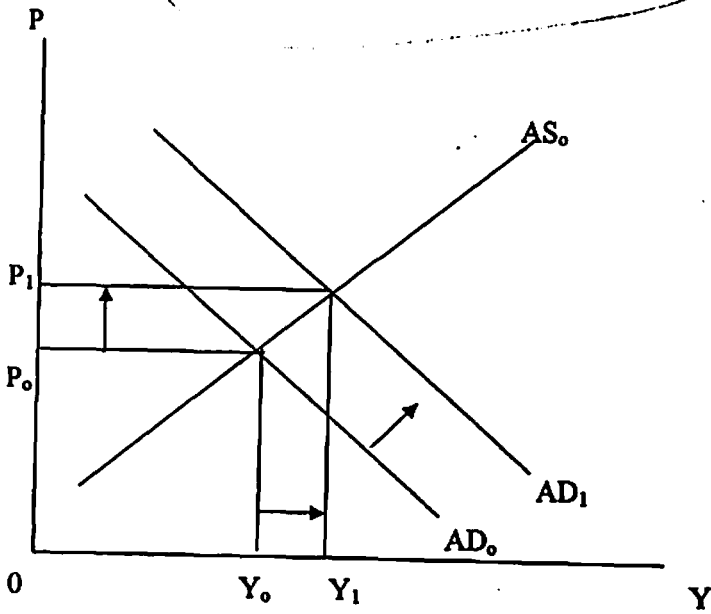
Untuk membentuk indeks harga, tiga langkah yang perlu dilakukan : (1) memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga, (2) menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harga-harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga, dan (3) menghitung indeks harga.

Faktor penyebab terjadinya inflasi adalah karena tekanan permintaan (*demand pull inflation*) dan karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) atau karena kombinasi keduanya. Inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Sedangkan inflasi biaya produksi terjadi karena kenaikan biaya produksi, sehingga menyebabkan penawaran agregat berkurang.

Pada Gambar 2.1. pada halaman berikut ini tekanan permintaan digambarkan dengan bergesernya kurva AD_0 ke AD_1 . Tekanan permintaan menyebabkan output perekonomian bertambah, tetapi disertai inflasi, dilihat dari semakin tingginya tingkat harga umum. Dalam inflasi tekanan permintaan, tidak selalu berarti penawaran agregat (AS) tidak bertambah, tetapi walaupun bertambah jumlahnya lebih kecil dibanding peningkatan permintaan agregat.

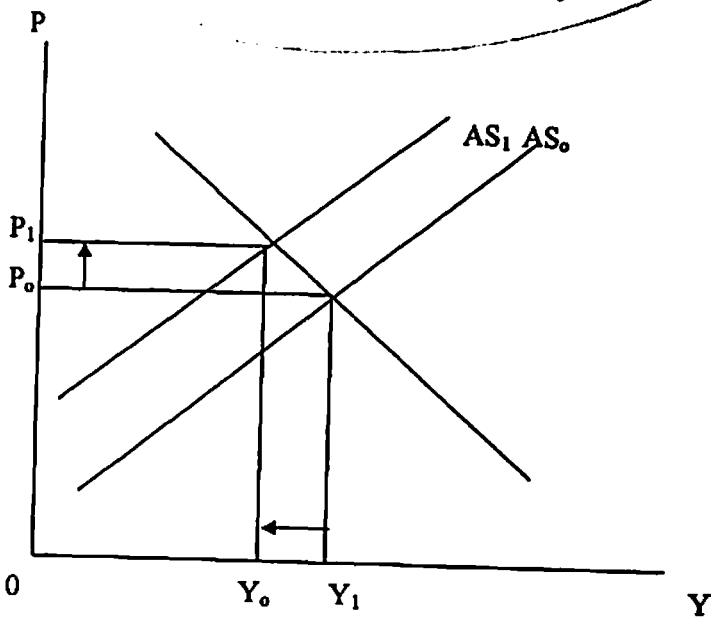
Gambar 2.1.
Inflasi Tekanan Permintaan

ket. d. bang



Gambar 2.2.
Inflasi Dorongan Biaya

ket. d. bang



Sumber gambar :

Inflasi biaya produksi ditunjukkan dalam Gambar 2.2. yang ditunjukkan dengan bergesernya kurva AS_0 ke AS_1 . Naiknya biaya produksi disebabkan naiknya harga input pokok. Misalnya kenaikan upah minimum regional (UMR) dan BBM akan menyebabkan biaya produksi barang-barang output sektor industri menjadi lebih mahal, yang mengurangi penawaran agregat. Jika yang berkurang adalah penawaran agregat. Inflasi akan disertai kontraksi ekonomi, sehingga jumlah output (PDB) menjadi lebih kecil ($Y_1 < Y_0$).

Di negara-negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut : (Sadono, 1994, 15-16)

1. tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa.
Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.
2. pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Apabila para pengusaha mulai menghadapi kesulitan dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja-pekerja yang ada akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga-harga barang mereka.

Kedua masalah diatas biasanya berlaku apabila perekonomian sudah mendekati tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.

Disamping itu inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari (1) kenaikan harga-harga barang impor, (2) penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan (3)

kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. (Sadono, 2002 : 16)

Inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu masalah tersebut perlu dihindari. Salah satu akibat penting dari inflasi ialah kecenderungannya menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan.

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk apabila inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sampai tingkat tertentu inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memicu produsen untuk meningkatkan outputnya. Kendatipun belum dapat dibuktikan secara matematis, umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun. Bagaimana jika inflasi melebihi angka 10%. Umumnya sudah mulai sangat mengganggu stabilitas ekonomi. Apalagi bila yang terjadi adalah hyper-inflasi (*hyper-inflation*), yaitu inflasi yang $\geq 100\%$ per tahun.

2.2. Pengaruh Kebijakan Moneter (*Monetary Policy*) Terhadap Pengeluaran Agregat Pendapatan Nasional dan Tingkat Harga.

Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan kebijakan makro ekonomi dapat dibedakan kedalam empat aspek berikut :

1. menstabilkan kegiatan ekonomi
2. mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi
3. menciptakan pertumbuhan ekonomi.
4. menghindari masalah inflasi.

Instrumen kebijakan makro ekonomi selain kebijakan fiskal adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pengetatan uang beredar nasional, kredit, serta sistem perbankan. Menurut Sukirno (2002 : 26) kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah – yang dilaksanakan oleh Bank Sentral – untuk mempengaruhi (merubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Kebijakan moneter juga merupakan upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke arah kondisi yang diinginkan dengan lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sasaran akhirnya adalah meningkatnya output keseimbangan dan tercapainya stabilisasi harga dimana laju inflasi dapat dikendalikan. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar sebagai upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. (Rahardja, 2001; 359)

Dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan :

1. pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. investasi perusahaan-perusahaan
3. pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan
4. ekspor (pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara lain).

Tujuan utama dari pada kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau tingkat bunga. Ada tiga instrumen utama yang

digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, yaitu operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount rate*), dan rasio cadangan wajib (*reserve requirement ratio*).

Operasi Pasar Terbuka :

Operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (*government securities*). Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga (*open market selling*). Sedangkan jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli kembali surat-surat berharga tersebut (*open market buying*).

Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Sebaliknya bila ingin menahan laju pertumbuhan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman.

Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya bila pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, maka akan memperbesar angka multiplikasi uang yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar.

2.3. Uang

Perekonomian dapat dibedakan dalam perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai "perekonomian uang".

Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang. Semakin modern sesuatu negara semakin penting peranan uang dalam menggalakkan kegiatan perdagangan. (Sukirno, 2002 ; 190)

Dari sudut pandang ekonom, uang merupakan stok asset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Uang adalah alat pertukaran atau metode pembayaran. Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Sehingga seperti dikatakan Sukirno (2002) uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar / perdagangan.

Dalam bukunya Sukirno (2002) menyatakan syarat-syarat penggunaan uang sebagai berikut :

1. nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. mudah dibawa-bawa
3. mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
4. tahan lama
5. jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
6. bendanya mempunyai mutu yang sama

Uang mempunyai peran dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi negara, serta mempunyai peran dalam melancarkan ekonomi negara. Dalam ilmu ekonomi peranan uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. untuk melancarkan kegiatan tukar menukar
2. untuk menjadi satuan nilai
3. untuk ukuran bayaran yang ditunda
4. sebagai alat penyimpan nilai

Sedangkan Rahardja (2001) berpendapat tentang fungsi uang seperti dijelaskan pada halaman berikut :

1. Satuan Hitung (*unit of Account*)
2. Alat Transaksi (*Medium of Exchange*)
3. Penyimpan Nilai (*Store of Value*)
4. Standar Pembayaran di Masa Mendatang (*Standard of Deferred Payment*)

} 1 gun

Jenis-jenis uang yang digunakan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar adalah :

1. natura

uang yang mula-mula digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beras, jagung, pancing, pedang, pisau, dll

2. emas dan perak

uang yang terbuat dari emas dan perak telah mulai digunakan sejak abad ketujuh sebelum masehi. Kemajuan ekonomi yang dicapai sesudah revolusi industri menyebabkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Permintaan atas emas dan perak untuk digunakan sebagai uang bertambah dengan pesat pula. Namun demikian terdapat kelemahan akan penggunaan uang emas dan perak, yaitu (1) emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, (2) emas dan perak merupakan benda yang berat, (3) emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya.

3. uang kertas dan uang Bank

untuk mengatasi kelemahan dari penggunaan uang emas dan perak, digunakan uang kertas. Pada mulanya uang kertas yang dikeluarkan digunakan untuk menggantikan sejumlah emas yang dimiliki seseorang yang disimpan didalam bank. Lama kelamaan uang kertas yang dikeluarkan oleh bank tidak lagi berdasarkan kepada jumlah uang emas yang disimpan di dalam bank tersebut.

Apabila didalam perekonomian telah terwujud kebutuhan yang mendesak akan uang maka bank-bank umum, sampai dengan jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian setelah periode tersebut uang

kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum.

Masyarakat masih tetap bersedia menggunakan uang yang diciptakan seperti dijelaskan di atas karena uang kertas yang dikeluarkan itu dijanjikan bahwa apabila pemegangnya ingin menggantikan uang tersebut dengan emas, maka bank umum tersebut setiap waktu akan bersedia untuk melakukannya. Ini berarti emas yang berada di bank-bank umum (yang dipercayakan kepada bank-bank itu untuk disimpan) akan digunakan oleh bank-bank tersebut sebagai cadangan untuk menciptakan lebih banyak uang kertas.

Dalam keadaan politik dan perekonomian yang stabil, para pemegang uang kertas yang diciptakan oleh bank-bank umum tersebut tidak akan menukarnya dengan emas. Oleh sebab itu walaupun uang kertas yang diciptakan melebihi nilai emas yang disimpan, bank-bank umum akan selalu dapat memenuhi keinginan dari beberapa pemegang uang kertas yang ingin menukarkannya dengan emas.

Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara, bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum tetapi oleh Bank Sentral. Sekarang ini bank umum tidak diberi kekuasaan lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Walaupun bank-bank umum sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengeluarkan uang kertas, bukan berarti bahwa kekuasaannya untuk menciptakan uang sudah hilang. Justru sebaliknya, bahwa kekuasaan bank-bank umum untuk menciptakan uang telah menjadi sangat bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang buruk pada perekonomian.

Di negara-negara yang sudah maju sistem keuangannya, bank-bank umum merupakan pencipta uang yang terutama. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral atau uang bank atau rekening koran. Oleh karena itu bank-bank umum mempunyai pengaruh yang penting sekali dalam kegiatan ekonomi. (Sukirno, 2002; 198)

2.4. Teori Permintaan Uang

Teori yang menjelaskan mengenai permintaan uang dapat dibedakan menjadi teori Klasik dan teori Keynesian. (Rahardja, 2001 : 147-152)

1. Teori Permintaan Uang Klasik

Menurut pandangan ekonom Klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Karenanya jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Bila tingkat output meningkat, maka permintaan uang meningkat, begitu juga sebaliknya. Jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bukanlah semata-mata nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga (*real money balances*).

$$(M/P)^d = k.Y$$

dimana :

$(M/P)^d$ = permintaan uang riil

M = nilai nominal uang

P = tingkat harga

Y = pendapatan atau output

k = proporsi permintaan uang terhadap pendapatan atau output

Karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral (*money neutrality*), dalam arti uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan kuantitas uang Klasik (*Classical quantity of money*)

$$M \times V = P \times T \text{ atau } MV = PT$$

dimana :

M = jumlah uang beredar

V = velositas uang

P = tingkat harga umum

T = jumlah unit transaksi

Dengan demikian Jumlah Uang x Velositas = Harga x Transaksi.

Velositas uang merupakan konsep yang menunjukkan berapa kali dalam setahun uang berputar di dalam sebuah perekonomian. Dalam jangka pendek, kecepatan uang beredar dianggap tetap.

Kesulitan dari model di atas adalah pengukuran unit transaksi (T) yang memungkinkan terjadinya penghitungan ganda. Sebab dalam dunia nyata, output yang dihasilkan amat beragam. Untuk mengurangi kesulitan tersebut, maka nilai untuk T yang digunakan adalah nilai output riil (PDB) riil.

Karena fungsi uang semata-mata sebagai alat transaksi, sedangkan velositas diasumsikan tetap, maka dalam persamaan $(M/P)^d = kY$; dimana k yang merupakan proporsi kebutuhan uang terhadap pendapatan, besarnya adalah $1/V$.

2. Teori Permintaan Uang Keynesian

Menurut teori Keynes ada tiga motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi (*transaction motive*), berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan memperoleh keuntungan (*speculation motive*).

Permintaan uang untuk transaksi dalam teori Keynes adalah sama dengan permintaan uang dalam teori Klasik. Masyarakat memegang uang dalam rangka mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; Bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk transaksi meningkat.

Hal lain yang juga memotivasi orang memegang uang adalah persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan atau tak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; jika pendapatan meningkat permintaan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat. Hubungannya dengan tingkat pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$M_t = f(Y)$$

dimana : M_t = permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga

Y = pendapatan

$$\frac{\partial M_t}{\partial Y} \geq 0$$

Konsekuensi dengan fungsinya sebagai penyimpan nilai, uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai motivasi spekulasi.

Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari dua aset finansial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lainnya adalah obligasi (*bond*), yaitu surat utang yang disertai janji memberikan pendapatan bunga. Jenis obligasi yang dimaksudkan oleh Keynes adalah obligasi yang jatuh temponya tidak terbatas (*consol bond*) dan tidak memiliki resiko gagal ditagih (*default*).

Keuntungan dari memegang uang adalah likuiditasnya yang sempurna. Kapanpun dibutuhkan, pada saat itu juga dapat digunakan untuk transaksi. Tetapi biaya dari memegang uang adalah hilangnya kesempatan memperoleh bunga, dibanding bila menyimpannya dalam bentuk obligasi. Sebaliknya obligasi akan memberikan pendapatan bunga, tetapi mengandung resiko dari memegang obligasi yaitu harga jual yang lebih rendah dari harga nominal (*capital loss*). Namun resiko ini diimbangi oleh kemungkinan mendapat keuntungan dari menjual obligasi (*capital gain*).

Perubahan harga obligasi ditentukan oleh tingkat bunga pasar yang terjadi di masa mendatang. Penilaian tentang tingkat bunga, dikaitkan dengan tingkat bunga pasar yang dianggap normal. Bila masyarakat menilai tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini adalah terlalu tinggi, mereka berekspektasi tingkat bunga di masa mendatang akan turun. Tentunya harga obligasi akan naik, sehingga lebih menguntungkan bila memegang obligasi. *Jadi pada tingkat bunga yang tinggi permintaan uang rendah.* Bila tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini dianggap terlalu rendah, masyarakat berekspektasi tingkat bunga akan turun. Harga obligasi akan turun, sehingga lebih menguntungkan memegang uang. *Pada tingkat bunga rendah permintaan uang meningkat. Dengan demikian ada hubungan berbanding terbalik antara tingkat bunga dengan permintaan uang berdasarkan pertimbangan memperoleh keuntungan (spekulasi).*

2.5. Mata Uang Dalam Peredaran dan Uang Beredar

Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. (Sukirno, 2002 : 207)

Menurut Rahardja (2001) yang dimaksud dengan jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral.

$$M_1 = C + D$$

dimana :

- M_1 = jumlah uang beredar dalam arti sempit
- C = uang kartal = uang kertas + uang logam
- D = uang giral atau cek

Uang beredar dalam arti luas (M_2) adalah M_1 ditambah deposito berjangka (*time deposit*),

$$M_2 = M_1 + TD$$

dimana :

- M_2 = jumlah uang beredar dalam arti luas
- TD = deposito berjangka (*time deposit*)

Secara teknis, yang dihitung sebagai uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank (bank umum dan bank sentral), serta uang kertas dan logam (uang kartal) milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar.

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian bertumbuh atau

berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal (kertas dan logam) makin sedikit, digantikan uang giral atau *near money*. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi M_1 dalam peredaran uang makin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar. Gejala tersebut diatas juga terjadi di Indonesia, dilihat dari pertambahan jumlah uang beredar dan perubahan komposisinya.

Demikian pula, Sukimo (2002) dalam bukunya membedakan pengertian uang beredar ke dalam pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang terbatas uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan-perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas uang beredar meliputi (1) mata uang dalam peredaran, (2) uang giral, dan (3) uang kuasi.

Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening (tabungan) valuta asing milik swasta domestik. Uang beredar menurut pengertian yang luas ini dinamakan juga sebagai likuiditas perekonomian atau M_2 . Pengertian yang sempit dari uang beredar selalu disingkat M_1 .

Tabungan dan deposito berjangka adalah kekayaan keuangan dengan likuiditas yang tinggi yang hampir sama dengan uang, yaitu dapat cepat diubah menjadi uang tetapi tidak dapat dengan cepat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Pemilik uang kuasi harus pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menukar tabungan dan deposito berjangkanya dengan uang. Karena likuiditasnya yang sangat tinggi inilah maka uang kuasi disebut juga dengan *near money*.

Dalam pengertian uang beredar yang terbatas yang dicerminkan hanyalah jumlah uang yang dapat digunakan untuk melancarkan jalannya transaksi-transaksi dan belum sepenuhnya menggambarkan jumlah uang yang dalam waktu singkat dapat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang dan

jasa-jasa adalah lebih dicerminkan oleh nilai uang beredar yang diartikan secara lebih luas.

2.6. Proses Penciptaan Uang oleh Bank Umum

Dalam suatu perekonomian modern dikenal adanya lembaga keuangan atau institusi keuangan. Jika uang dapat dianalogikan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka lembaga keuangan adalah jantungnya. Sebab melalui lembaga keuanganlah uang yang ada dalam perekonomian dihimpun dan dialirkan ke sektor kegiatan-kegiatan yang membutuhkan.

Lembaga keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Rahardja (2001) dalam bukunya mendefinisikan lembaga keuangan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan.

Lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi internasionalnya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*). Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan. Sedangkan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan non-depositori (*nondepository financial institution*), yang disebut juga sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan yang lazim terdapat di berbagai negara, antara lain : (1) pasaran saham, (2) perusahaan peminjaman, (3) bank tabungan, (4) perusahaan asuransi, dan (5) bank umum atau bank perdagangan.

Jenis LKBB menurut Rahardja (2001) adalah perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian. Di Indonesia berdasarkan Keppres No. 61/1988, kegiatan-kegiatan usaha yang masuk dalam lingkup perusahaan pembiayaan adalah : sewa guna (*leasing*), modal ventura (*capital venture*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*), dan perdagangan surat-

surat berharga (*securities company*). Dalam perkembangan selanjutnya, di tahun 1989 bidang usaha penjualan surat berharga dikeluarkan dari lingkup perusahaan pembiayaan. Tahun 1995, bidang usaha modal ventura menyusul dikeluarkan dari ruang lingkup perusahaan pembiayaan.

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Hal ini karena bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu : (Sukirno, 2002 : 200)

1. kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek.
2. kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapus daya beli yang ada di dalam perekonomian.
3. memberi pinjaman jangka pendek.

Kegiatan usaha bank umum antara lain adalah : (Rahardja, 2001 : 166)

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. memberikan kredit.
3. menerbitkan surat pengakuan utang.
4. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
5. kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum adalah : (Rahardja, 2001 : 166)

1. melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang.
2. melakukan usaha perasuransian.
3. melakukan usaha lain seperti yang diatur undang-undang.

Proses penciptaan uang terjadi di dalam sistem perbankan, dimana bank yang pertama kali memperoleh deposito akan menyalurkannya kepada bank berikutnya (bank kedua) sebagai pinjaman. Bank kedua akan menyalurkan pinjaman yang diperolehnya dari bank pertama kepada bank ketiga. Begitu seterusnya hingga jumlah tak terhingga.

Besarnya deposito yang dapat diubah menjadi pinjaman, tergantung dari ketentuan besarnya giro wajib minimum atau GWM (*reserve requirement ratio*, RRR). *Semakin rendah RRR nya maka daya ekspansi kredit perbankan makin besar.*

Proses penciptaan uang tersebut dapat dijelaskan melalui model matematis sederhana di bawah ini. Definisi jumlah uang yang digunakan adalah M_1 . tiga konsep yang harus diketahui guna menurunkan persamaan matematis penciptaan uang adalah :

1. **uang primer (*monetary base*)** dengan notasi **B** adalah jumlah uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk **uang kartal (C)** dan **cadangan wajib (R)**. Uang primer dikontrol oleh Bank Sentral.
2. **giro wajib minimum (*reserve-deposit ratio* atau *reserve requirement ratio*, RRR)** yang besarnya ditentukan oleh Bank Sentral, notasinya adalah **rr**.
3. **rasio uang kartal-giral (*currency-deposit ratio*)** dinotasikan **cr**, yang menggambarkan pilihan bentuk uang yang dipegang masyarakat, dalam arti dari jumlah uang beredar, berapa bagian (%) yang disimpan dalam bentuk uang kartal dan berapa bagian (%) yang disimpan dalam bentuk uang giral.

$$C = cr \times D$$

$$\begin{aligned} \text{apabila } M_1 = C + D, \text{ maka } M_1 &= (cr \times D) + D \\ M_1 &= (cr + 1) D, \text{ atau} \\ D &= \frac{M_1}{(1 + cr)} \end{aligned}$$

persamaan diatas menunjukkan adanya hubungan proporsional jumlah uang giral dengan jumlah uang beredar.

Uang primer (*monetary base*): $B = C + R$

dimana :

B = uang primer

R = cadangan wajib

Cadangan wajib (R) adalah rr dikalikan uang giral : $R = rr \times D$

Dengan demikian persamaan matematis dari uang primer adalah :

$$B = (cr \times D) + (rr \times D)$$

$$B = (cr + rr) D$$

sehingga

$$D = \frac{B}{(cr + rr)}$$

persamaan diatas menunjukkan hubungan proporsional antara uang giral dengan uang primer. Untuk penyelesaian persamaan matematis jumlah uang beredar, maka :

$$D = \frac{M_1}{(1 + cr)} = \frac{B}{(cr + rr)}$$

$$M_1 = \frac{(cr + 1) \times B}{(cr + rr)}$$

$$M_1 = m \times B$$

dimana :

$$m = \frac{(cr + 1)}{(cr + rr)}$$

atau (m) disebut juga angka multiplier uang (*money multiplier*)

Karena mempunyai efek multiplikasi terhadap jumlah uang beredar, maka uang primer disebut juga uang berdaya tinggi (*high powered money*).

Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis: tabungan giral utama dan tabungan giral

derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut bank umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut.

Sedangkan tabungan derivatif tercipta apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Tabungan derivatif adalah tabungan giral yang diciptakan tanpa memasukkan uang tunai atau cek ke dalam bank tersebut.

2.7. Bank Sentral

Bank Sentral adalah bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Sukirno (2002) dalam bukunya mengatakan bahwa Bank Sentral mempunyai fungsi sebagai suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Lebih lanjut kemudian Bank Sentral didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang disertai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan, dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu dapat membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Sedangkan menurut Rahardja (2001) fungsi paling mendasar dari sebuah Bank Sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian (*to manage nations money supply*). Tetapi dalam praktiknya, Bank Sentral menjalankan banyak fungsi mulai dari penanganan penyelesaian giro (*clearing and collecting check*) sampai kepada pemberian izin, pembinaan dan pengawasan perbankan.

Jadi, tugas Bank Sentral adalah mengatur jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Dengan mengubah uang beredar Bank Sentral dapat mempengaruhi berbagai variabel keuangan dan variabel ekonomi, seperti tingkat suku bunga, harga saham, harga rumah dan kurs. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar akan meningkatkan suku bunga serta mengurangi investasi,

yang berarti menurunkan GNP (*Gross National Product*) dan inflasi. Bila dunia usaha sedang lesu, Bank Sentral akan menaikkan jumlah uang beredar serta merumuskan tingkat suku bunga untuk merangsang aktivitas perekonomian.

Secara umum ada tiga fungsi utama *Bank Sentral*, yaitu :

1. *agen fiscal pemerintah (fiscal agent of government)*
2. *banknya bank (banker of bank)*
3. *menentukan kebijakan moneter (monetary policy maker)*
4. *pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan (supervision, examination and regulation of members bank)*
5. *penanganan transaksi giro (the clearing and collection of checks)*
6. *riset-riset ekonomi (economic research)*

Bank Sentral berbeda dengan bank umum, perbedaannya adalah : (1) dalam perekonomian hanya terdapat satu Bank Sentral, (2) bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta, (3) tujuan kegiatan Bank Sentral dan bank umum berbeda, serta (4) Bank Sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam.

Adapun tugas Bank Sentral adalah : (Sukirno, 2002 : 212)

1. *Bertindak sebagai bank kepada pemerintah*

Pemerintah dapat dipandang sebagai perusahaan raksasa. Setiap hari harus membuat pengeluaran-pengeluaran dan menerima berbagai jenis pendapatan, seperti pajak pendapatan, pajak penjualan dan pajak impor. Untuk mengurus pengeluaran dan pendapatan pemerintah tersebut memerlukan jasa bank, dan Bank Sentral didirikan untuk memenuhi kebutuhan ini. Bank Sentral bertindak sebagai lembaga keuangan yang terutama menyimpan uang yang dimiliki pemerintah.

Adakalanya pemerintah berbelanja lebih banyak dari pada pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu pemerintah harus meminjam. di negara maju salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan *treasury bill*, yaitu pinjaman pemerintah yang akan dibayar kembali dalam jangka pendek. *Treasury bill* biasanya berjangka tiga bulan, namun ada yang enam bulan, sembilan bulan

bahkan satu tahun. *Treasury bill* akan dijual kepada lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat, dan juga kepada Bank Sentral. Dalam penjualan *treasury bill* Bank Sentral memegang peran yang sangat penting dan mempunyai kekuasaan untuk menentukan dan merubah tingkat bunga dari *treasury bill* tersebut.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai defisit dalam pengeluarannya adalah dengan mengeluarkan surat pinjaman (obligasi) jangka panjang atau dengan meminjam langsung dari Bank sentral. Apabila peminjaman kepada Bank Sentral itu sangat berlebih-lebihan, maka Bank Sentral harus mencetak lebih banyak uang. Namun demikian langkah tersebut dapat menimbulkan inflasi.

2. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum

Bank Sentral disebut juga sebagai “bank kepada bank” (*bankers' bank*) atau “sumber pinjaman terakhir” (*lender of the last resort*). Artinya Bank Sentral adalah bank dari bank-bank lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank Sentral disebut sebagai bank dari bank lainnya (*bankers' bank*), karena jasa-jasa yang diberikannya kepada bank umum adalah sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Sedangkan Bank Sentral disebut sebagai *lender of the last resort* adalah karena bank-bank umum dapat meminjam dari Bank Sentral apabila bank umum itu mengalami kekurangan cadangan. Cara lain yang dapat dilakukan bank umum adalah menjual surat berharga yang dimiliki bank umum ke Bank Sentral.

3. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Lembaga-lembaga keuangan termasuk bank umum, merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari meminjamkan uang yang dimilikinya. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal mereka haruslah meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan dan perorangan sebanyak yang mereka mungkin pinjamkan.

Pinjaman yang tidak diawasi akan menyebabkan badan keuangan meminjamkan uangnya kepada usaha-usaha yang sangat tinggi risikonya. Disamping itu, apabila pemerintah tidak mengawasi kegiatan mereka, lembaga-lembaga keuangan akan memberi pinjaman yang berlebihan pada masa perekonomian mencapai kemakmuran yang tinggi dan perekonomian sedang mengalami masalah inflasi. Sehingga tindakan ini akan memperburuk permasalahan inflasi yang sedang dihadapi.

Selain tersebut di atas, Bank Sentral juga diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengawasi dan memberi petunjuk kepada lembaga keuangan yang ada dalam perekonomian berkaitan dengan kebijakan yang mereka jalankan.

4. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri

Bank Sentral merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk menjaga kestabilan kegiatan impor, ekspor, dan aliran modal luar negeri dengan tujuan untuk menjamin tercapainya kestabilan perekonomian negara. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi negara adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing.

Untuk mencapai tujuan diatas pertama-tama haruslah dijaga agar terdapat keseimbangan diantara ekspor dan aliran masuk modal di satu pihak, dengan impor dan aliran keluar modal di lain pihak. Salah satu faktor yang dapat menjatuhkan nilai mata uang adalah keadaan perdagangan luar negeri dimana impor melebihi ekspor.

Selanjutnya harus pula dijaga agar terdapat cukup cadangan mata uang asing yang dapat sewaktu-waktu digunakan untuk membiayai pembayaran uang asing yang berlebihan ke negara-negara lain karena aliran keluar untuk pembayaran impor dan keperluan lain adalah lebih besar dari pada aliran masuk yang diterima dari ekspor dan pendapatan yang berasal dari luar negeri lainnya.

5. Mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan.

Pemerintah memberi kekuasaan kepada Bank Sentral untuk mencetak uang yang diperlukan untuk melicinkan kegiatan perdagangan dan produksi. Dalam menjalankan tugas ini Bank Sentral akan menentukan besarnya jumlah uang yang harus disediakan pada suatu waktu tertentu. Disamping itu dari satu waktu ke waktu lainnya Bank Sentral harus pula menentukan pertambahan jumlah uang yang perlu dilakukan agar kegiatan perdagangan dan produksi tetap dapat berjalan dengan lancar.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan membuktikan perbedaan kebijakan moneter yang berorientasi jumlah uang yang beredar dan yang berorientasi pengendalian inflasi.
2. Menganalisis dan membuktikan model kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam mengatasi laju inflasi yang tinggi.
3. Menganalisis dan membuktikan dampak dari kebijakan moneter yang berorientasi pengendalian inflasi terhadap kestabilan perekonomian.
4. Menganalisis dan membuktikan kebijakan ekonomi moneter yang diterapkan selama ini apakah perlu mengalihkan sasaran akhirnya dari pengendalian jumlah uang yang beredar dan penentuan tingkat suku bunga kepada sasaran akhir berupa pengendalian laju inflasi sebagai upaya terpeliharanya stabilitas harga.

3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menganalisis kebijakan moneter yang diterapkan dengan sasaran antara pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dan sasaran akhir pengendalian laju inflasi sebagai upaya menjaga stabilitas harga. Dengan mengetahui penyebab terjadinya inflasi, maka akan dapat diketahui kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambil keputusan di bidang moneter.
2. sebagai sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan terutama bagi ilmu ekonomi moneter.
3. sebagai sumbangan masukan bagi peneliti berikutnya dalam meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan moneter dalam upaya mengendalikan inflasi.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif -- penelitian kualitatif lebih berupaya memahami situasi tertentu -- yaitu meneliti tentang inflasi, penyebab inflasi, dampak yang ditimbulkan, serta kebijakan moneter yang mengatasinya. Dalam penelitian ini juga mencoba mengungkapkan kebijakan moneter yang bermuara pada sasaran pengendalian inflasi dengan sasaran antara pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga.

Penelitian ini mengambil lokasi di tingkat nasional dengan ruang lingkup di sektor moneter dan kebijakan moneter.

4.2. Definisi Operasional *Konseptual*

Inflasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kenaikan tingkat harga umum. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Indikatornya adalah angka indeks harga konsumen (IHK).

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah sebagai upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke arah kondisi yang diinginkan dengan lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Sasaran akhirnya adalah meningkatnya output keseimbangan dan tercapainya stabilisasi harga dimana laju inflasi dapat dikendalikan.

4.3. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Statistik wilayah Jawa Timur serta Bank Indonesia Cabang Surabaya. Data sekunder juga diambil dari beberapa buku, jurnal-jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta dari media internet.

4.4. Tehnik Analisis Data :

Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan tehnik perhitungan matematika dan statistika. Kemudian dianalisis sesuai dengan interpretasi teoritis dan dicoba untuk ditarik suatu kesimpulan berdasar dukungan kajian pustaka yang ada.

Untuk mengukur laju inflasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Laju inflasi tahun (t)} = \frac{\text{tingkat harga (tht)} - \text{tingkat harga (th t-1)}}{\text{Tingkat harga (tahun t-1)}}$$

Tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam praktek berupa indeks harga, yaitu rata-rata harga konsumen atau produsen (IHK atau IHP). Di Indonesia menggunakan perhitungan indeks harga konsumen (IHK).

Data mengenai angka inflasi serta jumlah uang beredar telah tersedia pada beberapa sumber data sekunder yang telah disebutkan diatas.

*Data : ekonomi
 indeks harga
 jumlah uang beredar =
 => inflasi ?*

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Hasil

5.1.1. Uang beredar di Indonesia

Secara teknis, yang dihitung sebagai uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank (bank umum dan Bank Indonesia), serta uang kertas dan logam (uang kartal) milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar.

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian bertumbuh atau berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal (kertas dan logam) makin sedikit, digantikan uang giral atau *near money*. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi M_1 dalam peredaran uang makin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar. Gejala tersebut diatas juga terjadi di Indonesia, dilihat dari pertambahan jumlah uang beredar dan perubahan komposisinya.

Yang dimaksud dengan uang beredar di Indonesia adalah terdiri dari :

- (a) Uang kartal yang beredar di luar Bank Indonesia, Bank-Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan kantor Bendahara Negara.
- (b) Uang giral yaitu saldo rekening koran pada bank-bank komersil dan bank-bank yang dapat dipersamakan dengan bank-bank komersil, yang setiap saat dapat diambil sebesar nilai nominalnya dan tidak dikenakan pinalti. Tidak termasuk disini adalah saldo rekening koran bank-bank pencipta uang giral, pemerintah dan bukan penduduk.

Sedangkan yang dimaksud uang kuasi dalam sistem moneter di Indonesia adalah Deposito Berjangka, Tabungan dalam rupiah, dan valuta asing, serta giro dalam valuta asing.

Tabel 5.1

Uang Beredar (M1) Di Indonesia
Tahun 1981 – 2004 (Dalam Milliar Rupiah)

Tahun	Uang Beredar (M1)			Komposisi (%)	
	Kartal	Giral	Jumlah	Kartal	Giral
1981	2,557	3,928	6,485	39.43	60.57
1982	2,934	4,187	7,121	41.20	58.80
1983	3,333	4,236	7,569	44.03	55.97
1984	3,712	4,869	8,581	43.26	56.74
1985	4,440	5,664	10,104	43.94	56.06
1986	5,338	6,339	11,677	45.71	54.29
1987	5,782	6,903	12,685	45.58	54.42
1988	6,246	8,146	14,392	43.40	56.60
1989	7,426	12,688	20,114	36.92	63.08
1990	9,094	14,725	23,819	38.18	61.82
1991	9,346	16,996	26,342	35.48	64.52
1992	11,478	17,301	28,779	39.88	60.12
1993	14,431	22,374	36,805	39.21	60.79
1994	18,634	26,740	45,374	41.07	58.93
1995	20,807	31,870	52,677	39.50	60.50
1996	22,487	41,602	64,089	35.09	64.91
1997	28,424	49,919	78,343	36.28	63.72
1998	41,394	59,803	101,197	40.90	59.10
1999	58,353	66,280	124,633	46.82	53.18
2000	72,371	89,815	162,186	44.62	55.38
2001	76,342	101,389	177,731	42.95	57.05
2002	80,666	111,253	191,919	42.03	57.97
2003	94,542	129,257	223,799	42.24	57.76
2004*	90,527	124,920	215,447	42.02	57.98

Sumber : Indikator Ekonomi, tahun 1990, 1994, 1997, 2000, 2004.

: Data tahun 1981 – 2003, akhir tahun (per Desember)

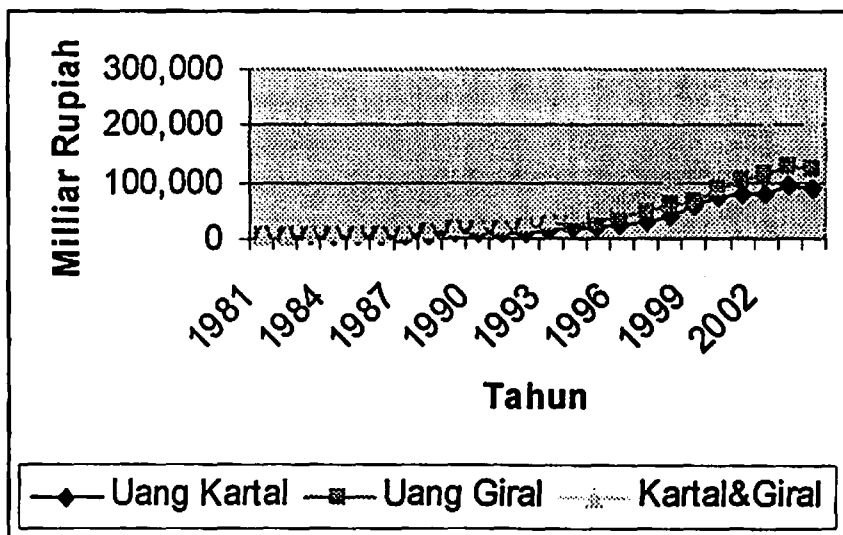
: Data tahun 2004, per April

Dari Tabel 5.1 di atas, terlihat bahwa terdapat kenaikan jumlah uang kartal dan giral. Dalam kurun waktu hampir 24 tahun sejak tahun 1981 sampai dengan April 2004 terdapat kenaikan jumlah uang kartal sampai dengan 35,40 kali lipat, yaitu dari 2.557 milyar rupiah pada tahun 1981 menjadi 90.527 milyar rupiah pada April tahun 2004. Demikian pula untuk jumlah uang giral, dari 3.928 milyar rupiah pada tahun 1981 menjadi 124.920 milyar rupiah pada April tahun 2004

atau meningkat sampai 31,80 kali lipat selama hampir 24 tahun. Kenaikan jumlah uang kartal mulai terlihat sejak tahun 1997, yaitu pada masa awal krisis, dan meningkat pesat mulai tahun 1998. Hal ini disebabkan karena adanya pada waktu itu terjadi ketidak-percayaan masyarakat terhadap nilai rupiah sehingga orang akan cenderung memegang uang kertas dan uang logam atau uang kartal.

Kenaikan uang giral mulai terlihat pesat sejak tahun 1996. Apabila dilihat dari perangnya maka uang giral mempunyai komposisi yang relatif lebih besar dari uang kartal. Biasanya bila perekonomian bertumbuh atau berkembang, jumlah uang beredar akan bertambah dan komposisinya mengalami perubahan. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal (kertas dan logam) makin sedikit, digantikan dengan uang giral atau *near money*.

Gambar 5.1
Uang Kartal dan Uang Giral
Tahun 1981 – 2004



Sumber : Indikator Ekonomi, tahun 1990, 1994, 1997, 2000, 2004, diolah kembali.

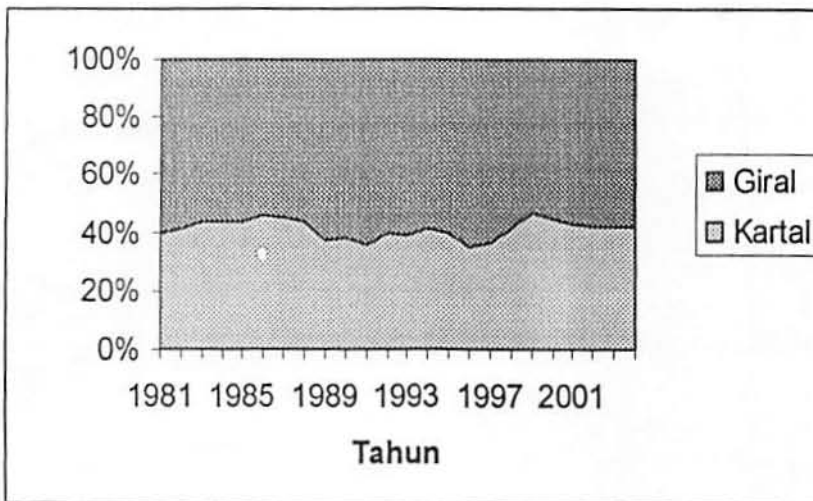
Dari Tabel 5.1 dan Gambar 5.1 di atas dapat ditunjukkan bahwa secara nominal terjadi kenaikan jumlah uang kartal maupun uang giral mulai tahun 1993

dan kemudian mengalami kenaikan terus menerus sampai pada tingkat yang sangat tinggi pada tahun 2003. Data tahun 2004 pada Tabel 5.1 adalah data sampai dengan bulan April (triwulan pertama), dimana angka nominalnya sudah hampir menyamai selama tahun 2003, sehingga dapat diprediksi bahwa uang kartal dan uang giral pada tahun 2004 secara nominal akan sangat besar.

Besarnya uang kartal dan uang giral di atas dapat menggambarkan adanya perekonomian yang sedang tumbuh. Perekonomian yang sedang tumbuh pesat akan memerlukan jumlah uang kartal dan giral yang semakin besar. Jumlah uang kartal dan giral (M_1) sebagai bagian dari uang beredar akan sangat berpengaruh pada besarnya laju inflasi. Perekonomian yang sedang tumbuh seperti dijelaskan pada hukum Okun dan kurva Phillips akan berpengaruh pada besarnya laju inflasi dengan hubungan yang positif. Sehingga besarnya jumlah uang beredar ini harus dibarengi dengan perputaran barang di sektor riil.

Gambar 5.2

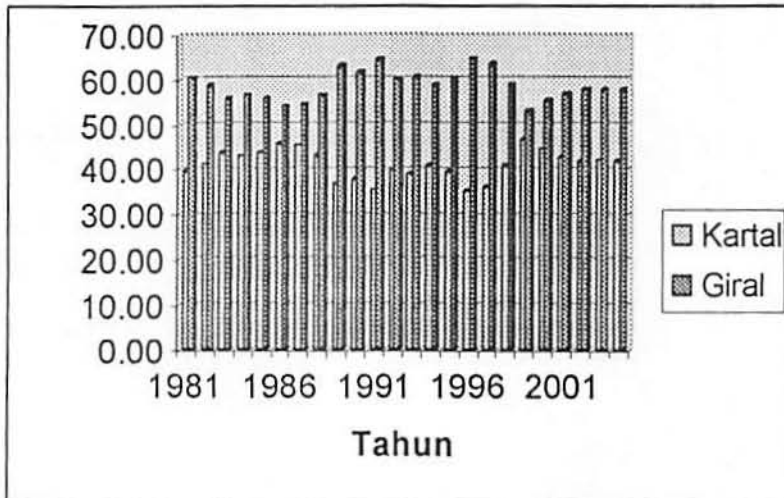
Persentasae Uang Kartal dan Uang Giral
Diagram Area, Tahun 1981 - 2004



Sumber : Indikator Ekonomi, tahun 1990, 1994, 1997, 2000, 2004, diolah kembali.

Persentase penggunaan uang kartal dan uang giral dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram gambar, yaitu pada Diagram Area pada Gambar 5.2 dan Diagram Batang pada Gambar 5.3. Dari kedua diagram gambar tersebut dapat ditunjukkan bahwa persentase uang giral dari tahun ke tahun selalu melebihi dari persentase uang kartal. Semakin maju perekonomian, maka porsi penggunaan uang kartal (kertas dan logam) makin sedikit, digantikan uang giral atau *near money*.

Gambar 5.3
Persentase Uang Kartal dan Uang Giral
Diagram Batang, Tahun 1981 - 2004



Sumber : Indikator Ekonomi, tahun 1990, 1994, 1997, 2000, 2004, diolah kembali.

Pada perekonomian yang sedang tumbuh pesat akan memerlukan jumlah uang beredar yang semakin besar. Jumlah uang kartal dan giral (M_1) serta uang kuasi (M_2) akan sangat dibutuhkan pada perekonomian yang berjalan semakin pesat. Namun demikian besarnya jumlah uang beredar tersebut akan berpengaruh pada besarnya laju inflasi. Biasanya bila perekonomian makin meningkat, komposisi M_1 dalam peredaran uang akan semakin kecil, sebaliknya porsi uang kuasi (M_2) akan semakin besar. Gejala tersebut diatas akan terlihat dari besarnya

pertambahan jumlah uang beredar dan perubahan komposisinya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2
Uang Beredar M_1 dan M_2 di Indonesia
Tahun 1970 – 1993 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Uang Beredar (M_1)			Uang Kuasi	Likuiditas Pekonomian (M_2)
	Kartal	Giral	Jumlah		
1970	155	95	250	80	330
1975	625	625	1.250	728	1.978
1980	2.153	2.842	1.995	2.696	7.691
1985	4.440	5.664	10.104	13.049	23.153
1990	9.094	14.725	23.819	60.811	84.630
1991	9.346	16.996	26.342	72.717	99.059
1992	11.478	17.301	28.779	90.274	119.053
1993	14.431	22.605	37.036	108.563	145.599

Sumber : 1. Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukuan, 1979/80
2. Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukuan 1990/91
3. Bank Indonesia, Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia, Mei 1994
4. dalam Sukirno, 2002, hal 209

Data yang ditunjukkan dalam Tabel 5.2 adalah data untuk tahun terpilih dalam periode 1970-1990 dan untuk tahun-tahun antara 1991 dan 1993. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa uang beredar dalam pengertian yang sempit, menunjukkan bahwa peran uang giral dari tahun ke tahun semakin memegang peran yang penting dibanding uang kartal, seperti juga telah banyak dijelaskan pada tabel dan gambar terdahulu. Demikian sebaliknya untuk uang kartal, pada tahun 1993 uang giral sebesar 22,605 triliun rupiah atau sekitar 61 persen dari seluruh M_1 .

Selama 23 tahun (1970 – 1993) telah terjadi peningkatan uang M_1 sebesar 148 kali lipat, yaitu dari 0.25 triliun menjadi 22,605 triliun. Namun demikian uang kuasi mengalami peningkatan yang lebih cepat dari M_1 , yaitu sebanyak 1357

kali, yaitu dari 0.08 triliun pada tahun 1970 menjadi 108,563 triliun pada tahun 1993. Kalau pada tahun 1970 uang kuasi adalah hanya kurang dari sepertiga M_1 , maka pada tahun 1993 uang kuasi menjadi hampir tiga kali dari besarnya M_1

Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan dalam rupiah, dan valuta asing, serta giro dalam valuta asing. Sebagai akibat penambahan uang kuasi yang pesat, maka M_2 yaitu likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam pengertian yang luas, juga mengalami penambahan yang sangat pesat. Jumlahnya meningkat dari 0,33 triliun dalam tahun 1970 menjadi 154,599 triliun pada tahun 1993 dan ini menunjukkan kenaikan sebesar 441 kali lipat.

5.1.2. Laju inflasi dan cara perhitungannya di Indonesia

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga umum. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Laju inflasi (persentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, satu barang dengan barang lainnya, dan berbeda pula dari daerah satu dengan daerah lainnya di Indonesia.

Laju inflasi adalah tingkat perubahan harga umum yang diukur dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Laju inflasi di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Harga 9 Bahan Pokok (IBP), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Di Indonesia penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ratus komoditas pokok, termasuk harga-harga makanan, pakaian, pemukiman, transportasi, kesehatan, dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Indeks harga dibuat dengan menimbang setiap harga sesuai dengan arti penting secara ekonomis dari komoditi yang bersangkutan-- menimbang secara proporsional terhadap pengeluaran keseluruhan konsumen pada jenis barang tersebut (melalui survey pengeluaran konsumen atau Survey Biaya Hidup (SBH)).

Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan

mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota propinsi di Indonesia, seperti tampak dalam Tabel 5.3. Sedangkan jumlah komoditi yang dihitung berbeda-beda untuk beberapa tahun penilaian, yaitu :

1. Mulai bulan Mei 1979, disajikan indeks harga 9 bahan pokok berdasarkan hasil SBH 1977/1978 di ibukota propinsi sebagai pengganti indeks yang berdasarkan hasil SBH 1957/1958 di Jakarta. Dalam indeks harga 9 bahan pokok (IBP) ini, beberapa jenis barang diwakili oleh lebih dari satu kualitas.
2. IHK dan laju inflasi sebelum bulan April 1990 mencakup 115 – 150 komoditas dengan menggunakan pola konsumsi hasil SBH di 17 ibukota propinsi tahun 1977/1978.
3. Mulai bulan April 1990, IHK mencakup sekitar 200-225 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil SBH di 27 ibukota propinsi tahun 1988/1989.
4. Mulai bulan April 1998, IHK mencakup sekitar 249-353 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil SBH di 44 kota tahun 1996.
5. Mulai bulan April 2000, IHK mencakup sekitar 249-353 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil SBH di 44 ibukota propinsi tahun 1996.
6. Mulai bulan Januari 2004, IHK mencakup sekitar 283-397 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil SBH di 45 kota tahun 2002.

IHK gabungan baik 17 ibukota propinsi, 27 ibukota propinsii, 43 kota maupun 44 kota merupakan hasil penghitungan dari gabungan indeks masing-masing kota yang ditimbang dengan banyaknya rumah tangga di kota bersangkutan.

Sejak April 1998, penyajian IHK pada metode ini, jenis barang/jasa dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu :

- a. bahan makanan
- b. makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
- c. perumahan

- d. sandang
- e. kesehatan
- f. pendidikan, rekreasi, dan olah raga
- g. transpor dan komunikasi

sedangkan IHK sebelum April 1998 masih mencakup 4 kelompok yaitu :

- a. makanan
- b. perumahan
- c. sandang
- d. aneka barang dan jasa

Tabel 5.3

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 27 Kota di Indonesia

Tahun 1994 – 1998

1988/1989 = 100

Akhir periode	IHK	Perubahan IHK (%) ↘
1994	163,17	9,60
1995	177,83	8,98
1996	189,62	6,63
1997	211,62	11,60
1998	375,89	77,63

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (Bank Indonesia), diolah kembali dalam Pratama Rahardja, 2001, hal 244

Tabel 5.3 di atas menyatakan bahwa tahun dasar penghitungan angka IHK adalah April 1988/Maret 1989, dengan angka 100. Angka perubahan IHK adalah angka inflasi per tahun. Dilihat dari cakupan komoditas yang dihitung, IHK kurang mencerminkan tingkat inflasi yang sebenarnya, karena hanya menyangkut sebagian kecil komoditas yang ada serta mencakup hanya beberapa kota di Indonesia.

Tabel 5.4
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) di Indonesia
Tahun 1995 – 1998

1983 = 100

Akhir Periode	IHPB	Perubahan IHPB
1995	240	11,62
1996	259	7,92
1997	282	8,88
1998	568	101,42

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (Bank Indonesia), diolah kembali.
 Dalam Pratama Rahardja, 2001, hal 246

Tabel 5.4 di atas menyatakan bahwa tahun dasar penghitungan angka IHPB adalah tahun 1983. Angka perubahan IHPB adalah angka inflasi per tahun. Apabila perubahan IHK merupakan nilai inflasi dilihat dari sisi konsumen, maka IHPB melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu indeks ini juga disebut sebagai Indeks Harga Produsen. Nilai IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

Walaupun sangat bermanfaat, perhitungan IHK, IPB, dan IHPB tersebut memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab dilihat dari metode penghitungannya kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa jumlah barang jasa serta terbatas hanya di beberapa kota saja. Padahal dalam kenyataan jenis barang yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu. Demikian juga kegiatan ekonomi juga tidak terjadi di beberapa kota saja melainkan seluruh pelosok wilayah. Sedangkan dalam penghitungan angka inflasi di Indonesia hanya dihitung pada sebagian daerah di Indonesia, yaitu :

- sampai dengan tahun 1989, laju inflasi dihitung atas dasar 17 kota di Indonesia yang didasarkan pada tahun dasar 1977/1978.
- Tahun 1990 – 1998, laju inflasi dihitung atas dasar 27 kota di Indonesia yang didasarkan pada tahun dasar 1988/1989.

- Tahun 1998 – 1999, laju inflasi dihitung atas dasar 44 kota di Indonesia yang didasarkan pada tahun dasar 1996.
- Tahun 2000-2003, laju inflasi dihitung atas dasar 44 kota di Indonesia yang didasarkan pada tahun dasar 1996.
- Mulai tahun 2004, laju inflasi dihitung atas dasar 45 kota di Indonesia yang didasarkan pada tahun dasar 2002.

Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (*GDP deflator*) atau IHI. Penghitungan inflasi dengan cara ini adalah dengan menghitung berdasarkan deflator PDB (*PDB deflator*), yaitu membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil. Selisih keduanya merupakan tingkat inflasi.

Tabel 5.5
Cara Perhitungan Inflasi dengan Menggunakan PDB Deflator
Tahun 1990 – 1998

Tahun	PDB nominal	PDB riil (th dasar 1990)	Pertumbuhan Nominal (RN)	Pertumbuhan riil (RR)	Inflasi RN-RR
1990	195.597	195.597	17,00	7,24	9,76
1991	227.450	209.192	16,29	6,95	9,34
1992	259.884	222.705	14,26	6,46	7,80
1993	329.776	237.172	26,89	6,50	20,39
1994	382.220	255.055	15,90	7,54	8,36
1995	452.381	276.003	18,36	8,2	10,14
1996	528.956	297.579	16,93	7,82	9,11

Sumber : *International Financial Statistic, 1997 (IMF)*, diolah kembali
Dalam Pratama Rahardja, 2001, hal 249

Persentase perubahan IHK (laju inflasi/deflasi) bulanan diperoleh dari :

$$\frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \times 100$$

dimana :

I_n = Indeks bulan n

I_{n-1} = Indeks bulan n-1

Penghitungan laju inflasi (perubahan IHK/IBP) dalam satu tahun dihitung dengan menggunakan metode kumulatif bulanan. Namun sejak tahun 1998 persentase (%) perubahan IHK/IBP dalam satu tahun dihitung dengan menggunakan *metode point to point*.

Indeks Harga 9 Bahan Pokok dan Indeks Harga yang dibayar petani disusun berdasarkan data hasil survey bulanan statistik harga konsumen di pasar pedesaan dengan memakai daftar HPI. Indeks harga yang diterima petani sumbernya adalah dari hasil survey harga produsen/*farmgate* yang dilaksanakan tiap bulan dengan memakai daftar HP2.1 dan HP2.2. Indeks Harga 9 Bahan Pokok disajikan untuk daerah pedesaan Jawa Madura dan Luar Jawa.

Sejak Maret 1989, Indeks Harga yang diterima dan dibayar petani serta nilai tukarnya menggunakan tahun 1983 sebagai tahun dasar. Nilai tukar petani adalah merupakan rasio antara Indeks Harga yang diterima (It) dengan yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Indeks harga yang diterima petani (IT) dan indeks yang dibayar petani (IB) serta nilai tukarnya disajikan terbatas hanya untuk masing-masing propinsi di luar Jawa. Dan sejak April 1995, Indeks Harga yang diterima dan dibayar petani serta nilai tukarnya disajikan pula di 10 propinsi luar Jawa dengan menggunakan tahun dasar 1987.

Sejak Juni 1999, Indeks Harga yang diterima dan dibayar petani nilai tukarnya menggunakan tahun dasar 1987. Indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayar petani (Ib) dihitung menggunakan Formula Laspeyres yang dikembangkan.

Data Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dikumpulkan setiap bulan oleh BPS dari 76 kota yaitu ibukota propinsi dan beberapa ibukota kabupaten yang ada kegiatan Perdagangan Besar. Sedangkan penghitungan mulai pada tahun 2000 data HPB dikumpulkan dari 126 kota. Penyajiannya hanya berupa angka nasional tanpa angka propinsi atau kabupaten.

Indeks umum harga Perdagangan Besar dikelompokkan atas 5 sektor yaitu pertanian, pertambangan dan galian, industri, impor dan ekspor. Masing-masing sektor terdiri dari sub sektor. Jumlah komoditi dari setiap sub sektor dinyatakan

dengan jumlah keseluruhannya 281 komoditi. Mulai tahun 2000 jumlah komoditi ini menjadi sebesar 327 komoditi.

IHK, IBP, dan IHPB dihitung menggunakan formula Laspayres yang dikembangkan, yaitu :

$$I_n = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{n-1}} P_{n-1} \cdot Q_o}{\sum P_o \cdot Q_o} \times 100$$

dimana :

- I_n = Indeks bulan n (bulan yang dihitung)
- P_n = Harga pada bulan ke n
- P_{n-1} = Harga pada bulan ke n-1 (bulan sebelumnya)
- $P_{n-1} Q_o$ = Nilai konsumsi bulan ke n-1
- $P_o Q_o$ = Nilai konsumsi tahun dasar

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan/konstruksi didasarkan atas perubahan harga 21 kelompok barang tertentu. Namun demikian sejak tahun 2000 IHPB mendasarkan atas perubahan harga 26 kelompok barang tertentu.

Perhitungan IHPB masing-masing jenis bangunan serta indeks umumnya menggunakan perubahan harga dari sejumlah kelompok barang yang dinyatakan dengan angka dalam kurung.

Kurs valuta asing dikumpulkan setiap hari Selasa dan Kamis dari tempat penukaran mata uang terpilih.

Harga emas juga dikumpulkan setiap hari Selasa dan Kamis dari toko penjual emas terpilih. Harga emas yang dicatat adalah harga emas perhiasan tanpa ongkos pembuatan.

Dalam perdagangan saham, saham yang diperdagangkan adalah saham yang terdaftar pada badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia, dikurangi dengan jumlah saham masing-masing perusahaan yang dijadikan jaminan untuk menerbitkan sertifikat PT Danareksa. Volume

perdagangan saham adalah jumlah transaksi saham yang terjadi setiap hari bursa di Bursa Efek Indonesia. Rata-rata perdagangan saham adalah jumlah saham diperdagangkan dibagi dengan hari bursa (Senin s/d Jumat kecuali hari libur).

Hasil perhitungan laju inflasi dengan menggunakan beberapa indikator perubahan harga umum di atas adalah seperti diikhtisarkan pada Tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.6
Laju Inflasi Beberapa Kota 17 Kota di Indonesia

Tahun	Inflasi
1984	8.76
1985	4.31
1986	8.83
1987	8.9
1988	5.47
1989	5.97
1990	9.53
1991	9.52
1992	4.94
1993	9.77
1994	9.24
1995	8.64
1996	6.47
1997	2.57
1998	77.63
1999	2.01
2000	9.35
2001	12.55
2002	10.03
2003	5.06
2004*	3.29

Sumber : Indikator Ekonomi, tahun 1990, 1994, 1997, 2000, 2004.

Data tahun 1997 data per Juni 1997

1984-1989 inflasi di 17 kota di Indonesia dg thn dasar 1978

1990-1999 inflasi di 27 kota di Indonesia dg thn dasar 1989

2000-2003 inflasi di 43 kota di Indonesia dg thn dasar 1996

sejak 2004 inflasi di 45 kota di Indonesia dg thn dasar 2002

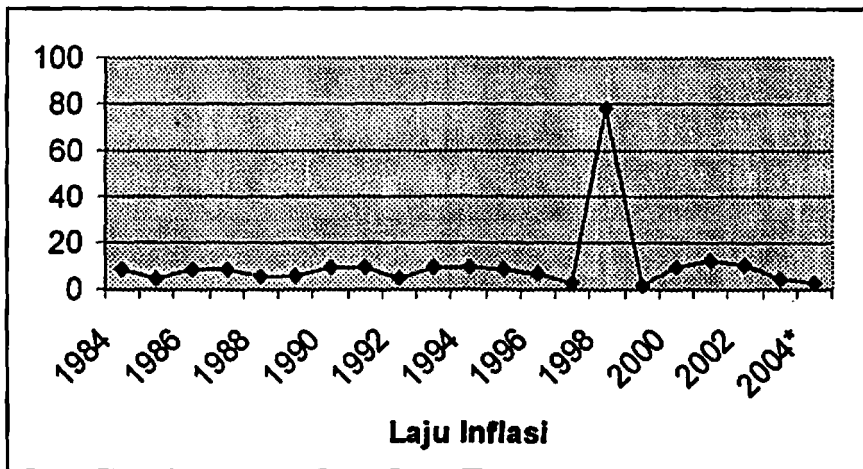
Dari Tabel 5.6 dan Gambar 5. di atas terlihat bahwa laju inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun cukup terkendali, walaupun cenderung mendekati angka 10. Namun demikian nilai laju inflasi tersebut masih berada di bawah

kategori inflasi yang moderat. Hanya saja pada tahun 1998 laju inflasi mencapai 77,63 persen.

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang multidimensional dan sangat menyulitkan perekonomian Indonesia untuk segera bangkit. Pada waktu itu laju inflasi hampir mendekati kondisi *hyper inflation* akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah yang memicu meningkatnya nilai utang swasta dan pemerintah serta memicu naiknya biaya produksi barang akibat struktur perekonomian industri Indonesia yang tidak ditopang oleh industri hulu yang strategis. Adanya suplai barang yang terbatas serta turunnya daya beli masyarakat juga merupakan penyebab tingginya laju inflasi pada waktu itu.

Kondisi riil dan moneter yang sulit tersebut semakin diperparah oleh adanya likuidasi beberapa bank swasta dalam negeri akibat kesulitan likuiditas serta tidak terpenuhinya syarat giro wajib minimum oleh beberapa bank akibat lemahnya pengawasan Bank Indonesia.

Gambar 5.3
Laju Inflasi Beberapa Kota di Indonesia
Diagram Garis, Tahun 1984 - 2004



Sumber : 1. Indikator Ekonomi, 1990, 1994, 1997, 2000, 2004, diolah kembali.
2. Kumulatif dari Januari – Desember dimana laju inflasi sejak bulan April 1990 dihitung dari IHK baru (1988/1989 = 100)

Laju inflasi yang terkendali penting artinya untuk stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian yang terkendali meliputi stabilitas harga, stabilitas pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang cukup dan sumber daya yang bekerja dengan kapasitas penuh, serta stabilitas bidang sector luar negeri.

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan terganggu dan semakin memburuk apabila inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi (bersifat kumulatif). Inflasi yang bertambah tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sampai tingkat tertentu inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memicu produsen untuk meningkatkan outputnya. Kendatipun belum dapat dibuktikan secara matematis, umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun. Bagaimana jika inflasi melebihi angka 10%. Umumnya sudah mulai sangat mengganggu stabilitas ekonomi. Apalagi bila yang terjadi adalah hyper-inflasi (*hyper-inflation*), yaitu inflasi yang $\geq 100\%$ per tahun.

5.1.3. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Yang didirikan pada tahun 1953 dengan mengubah status *De Javasche Bank B.N.V.* (yang dinasionalisasi pada tahun 1951) menjadi bank sentral Indonesia. Dasar hukum pendirian BI adalah Undang-Undang Nomor 11/1953.

Dilihat dari perubahan undang-undangnya, sejak 1953 BI telah mengalami dua kali perubahan kedudukan dan fungsi pokok. Perubahan pertama dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1968, sedangkan perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/1999. Perubahan-perubahan tersebut diringkas dalam Tabel 5.7 pada halaman berikut ini :

Tabel 5.7

**Perkembangan Status dan Fungsi Pokok Bank Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Sentral**

	UU No. 11/1953	UU No. 13/1968	UU No. 23/1999
Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Moneter • Dewan Direksi • Dewan Penasehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Direksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Gubernur
Status dan Tugas-tugas Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Sentral • Mengatur peredaran uang • Pemegang kas negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Sentral • Mengatur peredaran uang • Pemegang kas negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sentral dan melaksanakan kebijakan moneter • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran • Mengatur dan mengawasi bank
Hubungan Keuangan dengan Pemerintah	Dapat memberikan uang muka (kredit) kepada pemerintah, maksimum 30% dari penghasilan selama satu tahun anggaran	Dapat memberikan uang muka (kredit) sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan mengenakan bunga 3% per tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang memberikan kredit kepada pemerintah • Bank Indonesia membagi sisa surplus usahanya kepada pemerintah, setelah dipotong 30% cadangan tujuan, 10% cadangan umum dengan ketentuan setelah dipotong terlebih dahulu kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia.

Sumber : Pratama Raharja, 2001, hal 171.

Table 5.7 diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tetap memandang fungsi utama Bank Indonesia adalah sama seperti bank sentral di negara lainnya, terutama fungsi pengaturan peredaran uang. Yang berbeda dari undang-undang tersebut adalah aspek kepemimpinan dan hubungan dengan pemerintah. Dalam UU No. 23/1999, aspek penting yang dikedepankan adalah independensi Bank Indonesia, dalam arti Bank Indonesia harus bebas dari campur tangan pemerintah. Wujud independensi ini terlihat dalam dua hal, yaitu (1)

aspek kepemimpinan dan kewenangan BI, (2) hubungan keuangan dengan pemerintah.

Berdasarkan UU No. 23/1999 (Pasal 41), Gubernur dan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ketentuan ini Presiden tidak lagi mempunyai kemampuan intervensi terhadap kepemimpinan dan kewenangan BI.

Pada masa sebelumnya struktur kepemimpinan Bank Indonesia lebih kompleks dengan wewenang yang relatif luas. Misalnya berdasarkan UU No. 11/1953, yang memutuskan kebijakan moneter adalah Dewan Moneter, sedangkan pelaksanaannya adalah dewan Direksi. Berdasarkan UU No. 13/1968, yang memutuskan kebijakan moneter adalah pemerintah, pelaksanaannya adalah Dewan Direksi. Sedangkan berdasarkan UU No. 23/1999, Bank Indonesia memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter (Pasal 8 dan 10).

Berdasarkan UU No. 23/1999, Bank Indonesia tidak diizinkan lagi memberikan pinjaman kepada pemerintah demi menjaga independensinya (Pasal 56). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang sebelumnya dimana BI boleh memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pasal 62 UU No. 23/1999 menyatakan bahwa BI wajib membagi hasil kegiatan usahanya kepada pemerintah berdasarkan pembagian yang ditetapkan.

5.2. Pembahasan

Teori moneter menganalisa pengaruh jumlah uang beredar atas tingkat harga dan tingkat ekonomi negara. Teori moneter yang paling pokok adalah teori kuantitas dan teori moneter Keynes. Dari teori-teori itu akan dapat dilihat bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pertambahan penawaran uang dalam perekonomian perlu dikendalikan.

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya output keseimbangan dan terpeliharanya stabilitas harga atau terkontrolnya tingkat

eksplan
 5.2.1. ...
 5.2.2. ...
 5.2.3. ...
 5.2.4. ...

inflasi. Sasaran akhirnya adalah meningkatnya output keseimbangan dan tercapainya stabilisasi harga dimana laju inflasi dapat dikendalikan. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar sebagai upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.

Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif (*monetary expansive*). Sebaliknya jika jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif (*monetary contractive*). Istilah lain untuk kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

Kebijakan moneter adalah kebijakan pengetatan uang beredar nasional, kredit, serta sistem perbankan. Kebijakan moneter di Indonesia meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi (merubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau tingkat bunga.

Dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat tersebut dapat dibedakan ke dalam empat golongan :

1. pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. investasi perusahaan-perusahaan
3. pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan
4. ekspor (pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara lain).

Kebijakan moneter dikatakan efektif bila mampu mengendalikan tingkat output dan atau tingkat harga. Untuk mengevaluasi kebijaksanaan moneter, peralatan analisis yang paling sederhana namun komprehensif adalah kurva IS-LM.

Tabel 5.8
Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia
Tahun 1970 – 1999

Tahun	PDB Nominal (1)	Jumlah Uang Beredar			Tingkat Bunga (5)	$\frac{M_1}{M_2}$ (6)	$\frac{TD}{M_2}$ (7)	$\frac{PDBN}{M_1}$ (1)/(2)	$\frac{PDBN}{M_2}$ (1)/(4)
		M_1 (2)	TD (3)	$M_2 = M_1 + TD$					
1970	3.349	241	80	321	21%	0.75	0.25	14	10
1980	45.446	5.011	2.696	7.707	6%	0.65	0.35	9	6
1983	77.623	7.576	7.093	14.670	18%	0.52	0.48	10	5
1984	89.885	8.581	9.356	17.937	20.81%	0.48	0.52	10	5
1985	96.997	10.124	13.054	23.177	16.7%	0.44	0.56	10	4
1990	195.597	23.819	60.811	84.630	6%	0.27	0.73	8	3
1995	452.281	47.135	171.257	218.392	18%	0.22	0.78	10	2
1999	1.119.442	124.663	521.572	646.205	27.5%	0.19	0.81	9	2

Sumber : dalam Prathama Rahardja, 2001, hal 155.

Dari Tabel 5.7 diatas dapat dianalisis tentang hubungan perkembangan output dan jumlah uang beredar dalam perekonomian Indonesia. Terdapat hubungan yang searah antara pertumbuhan output dan jumlah uang beredar. Perkembangan output dilihat dari angka PDB yang makin membesar. *Semakin besar PDB semakin meningkat pula jumlah uang beredar.*

Tahun 1970 nilai PDB atas dasar harga berlaku adalah Rp 3.349 miliar, sedangkan M_1 sebesar Rp 241 miliar dan M_2 sebesar Rp 321 miliar. Pada tahun 1995 PDB atas dasar harga berlaku meningkat 135 kali menjadi Rp 452.281 miliar, M_1 mningkat 195 kali lipat menjadi Rp 47.135 miliar sedangkan M_2 meningkat 680 kali lipat menjadi Rp 218.392 miliar.

Selama 1970-1995 PDB atas dasar harga berlaku meningkat rata-rata 22% per tahun, sedangkan pertumbuhan PDB riil berdasarkan harga konstan 1990 sekitar 7% per tahun. Dengan demikian inflasi selama 1970-1995 mencapai rata-rata 15% per tahun. Ditinjau dari sisi pandang ilmu ekonomi, salah satu penyebab tingginya inflasi periode 1970-1995 adalah tingginya penambahan jumlah uang beredar (M_1), yang mencapai sekitar 24% per tahun.

Komposisi jumlah uang beredar dalam arti luas (M_2) baru mengalami perubahan di tahun 1984. sampai tahun 1984 jumlah M_2 didominasi uang kartal dan uang giral. Misalnya di tahun 1970 porsi uang kartal dan giral atau M_1 adalah 75% dari jumlah uang beredar (M_2). Sedangkan tahun 1980 porsi M_1 65% dari M_2 . baru pada tahun 1983 komposisi uang beredar hampir berimbang, yaitu 52% adalah M_1 dan 48% adalah deposito berjangka.

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan liberalisasi perbankan, dimana bank-bank diberi keleluasaan menentukan tingkat bunga untuk menarik dana dari masyarakat. Liberalisasi ini melambungkan tingkat bunga deposito dari hanya 6% per tahun menjadi 18% per tahun. Tingginya tingkat bunga deposito menjadi daya tarik bagi para pemilik uang untuk menyimpan uang di bank. Jumlah deposito berjangka meningkat terus, sehingga sejak tahun 1984 deposito berjangka mendominasi jumlah uang beredar (56% M_2). Tahun 1995 deposito berjangka merupakan 78% M_2 .

Pada periode krisis (1999) deposito berjangka merupakan 83% M_2 . Yang menarik diamati selama periode krisis tersebut adalah jumlah uang beredar bertambah sangat cepat dari Rp 47.135 miliar (M_1) pada tahun 1995 (sebelum krisis ekonomi), menjadi Rp 124.663 miliar pada tahun 1999 atau meningkat 285% per tahun. Padahal tahun 1999 nilai PDB riil menurun jauh, sehingga hanya sebesar PDB riil 1994. Bahkan bila dibandingkan dengan M_2 pada tahun 1999 yang berjumlah Rp 646.205 miliar, pada saat itu nilai PDB riil 1999 berdasarkan harga konstan 1993 adalah Rp 378.000 miliar. Bila PDB riil menggambarkan jumlah unit output yang tersedia, maka di tahun 1999 jumlah uang beredar jauh lebih banyak dari unit output.

Sementara itu velositas uang (PDB nominal/ M_1) selama periode 1970 - 1995 umumnya relatif stabil., yaitu berkisar antara 9-10 kali per tahun. Tetapi rasio PDB nominal/ M_2 mengalami penurunan, bahkan memasuki tahun 1990-an rasionya hanya di sekitar angka dua. Hal ini disebabkan oleh makin besarnya porsi deposito berjangka dalam M_2 .

Pergeseran LM karena pengaruh perubahan jumlah uang beredar yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi, karena

mengubah titik potong kurva IS-LM yang berarti mengubah titik keseimbangan ekonomi.

Pada Gambar 5.4 berikut ini menunjukkan bahwa jika Pemerintah Indonesia menambah jumlah uang beredar, kurva LM akan bergeser ke kanan (dari LM_0 ke LM_1), sehingga titik keseimbangan juga bergeser dari E_0 ke E_1 . pada titik keseimbangan yang baru (E_1), output keseimbangan bergeser menjadi lebih besar, sehingga dikatakan bahwa kebijakan moneter yang ekspansif tersebut telah berhasil memicu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat bunga.

Sebaliknya apabila pemerintah mengurangi jumlah uang beredar, maka sebaliknya kurva LM bergeser ke kiri menyebabkan titik keseimbangan bergeser ke E_2 . pada saat itu output keseimbangan adalah Y_2 yang lebih kecil dari Y^* , sedangkan tingkat bunga naik dari r_0 ke r_2 yang berarti telah terjadi inflasi.

Dalam perekonomian pasar, kenaikan tingkat bunga mengindikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi. Akibat dari kenaikan tingkat bunga dapat dilihat dari dua sisi :

1. sisi output

kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, sebagai akibatnya penambahan kapasitas produksi menjadi lebih kecil

2. sisi biaya

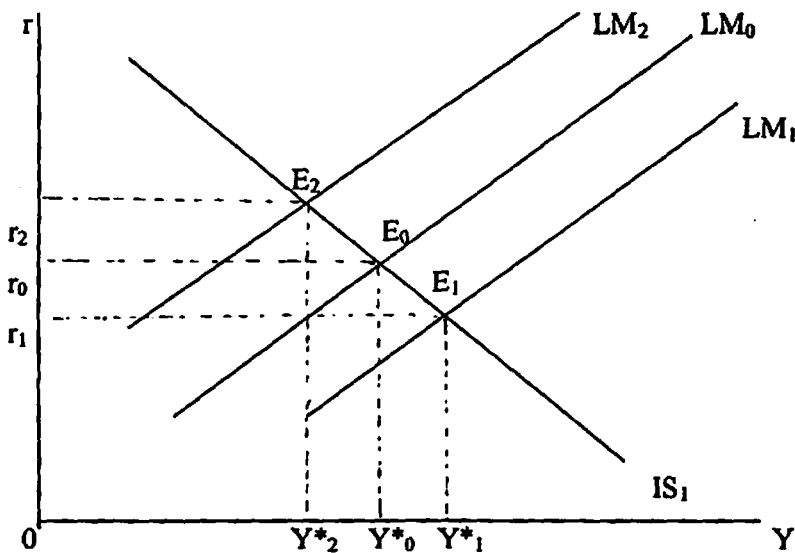
kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal.

Dari kedua hal diatas, yaitu tinjauan sisi output dan biaya, dapat berakibat terjadinya kenaikan tingkat bunga sehingga dapat memicu terjadinya inflasi.

Jadi, jumlah uang beredar serta naik turunnya tingkat bunga dapat berakibat pada perubahan laju inflasi di Indonesia. Namun demikian penyebab terjadinya inflasi dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran yang keduanya dapat disebabkan oleh jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga dan sebab-sebab yang lain. Sehingga kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebaiknya ditujukan langsung kepada penyebab inflasi (*inflation targeting*) seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, nilai tukar, hutang swasta dan

pemerintah terhadap pihak luar negeri, serta sebab-sebab lain di luar bidang moneter, yaitu permasalahan di sektor riil.

Gambar 5.4
Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian



Gambaran penjelasan di atas adalah merupakan salah satu dari berbagai kemungkinan yang terjadi. Secara grafis hasil dari kebijakan moneter pemerintah sangat ditentukan oleh kondisi pasar barang-jasa dan pasar uang modal, yang digambarkan oleh sudut kemiringan kurva IS dan kurva LM.

Apabila kurva IS lurus sejajar dengan sumbu vertikal, artinya adalah permintaan investasi tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga.

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan moneter dapat dilakukan dengan melihat titik-titik potong kurva-kurva IS dan LM. Karena kurva IS dan LM masing-masing memiliki minimal tiga kondisi, maka minimal ada sembilan kombinasi titik potong kurva IS-LM. Dari kesembilan kombinasi tersebut, dua diantaranya tidak terdefinisikan, yaitu (1) kondisi kondisi IS mendatar dan LM mendatar, dan (2) kondisi IS tegak lurus dan LM tegak lurus. Dari kesembilan kondisi tersebut dapat diikhtisarkan dalam Tabel 5.9 pada halaman berikut :

Tabel 5.9
Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Output
Dan Tingkat Bunga

	Kurva IS datar elastis sempurna	Kurva IS inelastis sempurna	Kurva IS negatif
Kurva LM elastis sempurna (interval Keynes)	Tidak terdefinisikan	Moneter ekspansif atau kontraktif tidak efektif, Y^* dan tingkat bunga tetap	Moneter ekspansif atau kontraktif tidak efektif, Y^* dan tingkat bunga tetap
Kurva LM elastis sempurna (interval Klasik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. moneter ekspansif : Y^* naik, tingkat bunga tetap 2. moneter kontraktif : Y^* turun, tingkat bunga tetap 	Tidak terdefinisikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. moneter ekspansif : Y^* naik, tingkat bunga tetap 2. moneter kontraktif : Y^* turun, tingkat bunga tetap
Kurva LM positif (interval antara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. moneter ekspansif : Y^* naik, tingkat bunga tetap 2. moneter kontraktif : Y^* turun, tingkat bunga tetap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. moneter ekspansif : Y^* naik, tingkat bunga tetap 2. moneter kontraktif : Y^* turun, tingkat bunga tetap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. moneter ekspansif : Y^* naik, tingkat bunga tetap 2. moneter kontraktif : Y^* turun, tingkat bunga tetap

Dari berbagai kondisi dan kemungkinan kebijakan moneter yang dapat dilakukan, di bawah ini terdapat data jumlah uang beredar dengan data inflasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu dua puluh tahun.

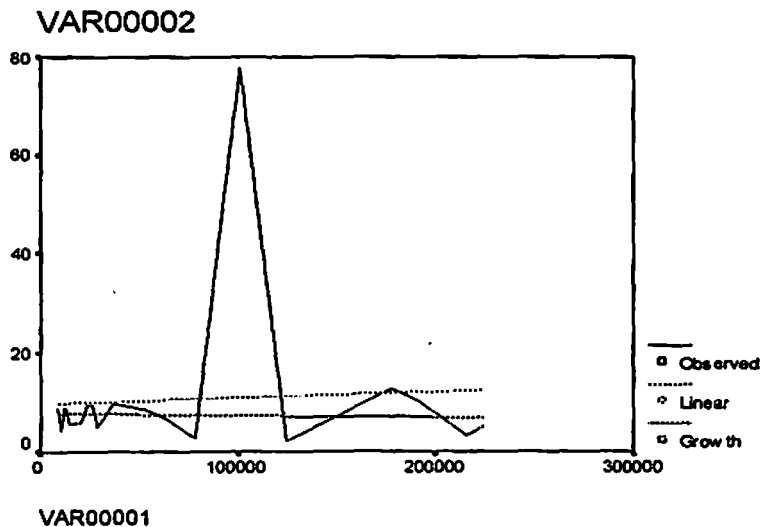
Dari data jumlah uang beredar dan inflasi tersebut kemudian dibuat suatu kurva estimasi yang menggambarkan hubungan regresi antara data jumlah uang beredar dan inflasi di Indonesia. Variabel 1 menggambarkan jumlah uang beredar, sedangkan variabel 2 menggambarkan laju inflasi. Dari hasil estimasi kurva regresi dua variabel tersebut terlihat bahwa pertumbuhan inflasi di Indonesia relatif stabil, walaupun pada tahun 1998 terjadi lonjakan laju inflasi

akibat situasi krisis ekonomi yang multidimensional termasuk krisis moneter yang dipicu oleh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang berakibat pada peningkatan hutang pemerintah dan swasta serta berpengaruh secara lebih luas terhadap sektor riil akibat lemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Lemahnya fundamental ekonomi di Indonesia adalah lemahnya struktur ekonomi industri di Indonesia yang didominasi oleh industri yang mempunyai "linkage" yang lemah, yaitu industri-industri dalam negeri yang mayoritas masih menggunakan bahan baku impor.

Tabel 5.10
Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia
Tahun 1984 – 2004

Tahun	Jumlah Uang Beredar	Inflasi
1984	8,581	8.76
1985	10,104	4.31
1986	11,677	8.83
1987	12,685	8.9
1988	14,392	5.47
1989	20,114	5.97
1990	23,819	9.53
1991	26,342	9.52
1992	28,779	4.94
1993	36,805	9.77
1994	45,374	9.24
1995	52,677	8.64
1996	64,089	6.47
1997	78,343	2.57
1998	101,197	77.63
1999	124,633	2.01
2000	162,186	9.35
2001	177,731	12.55
2002	191,919	10.03
2003	223,799	5.06
2004	215,447	3.29

Gambar 5.4
Kurva Estimasi Linear Antara Jumlah Uang Beredar
dan Laju Inflasi di Indonesia



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah uang beredar adalah kebijakan moneter yang bertujuan secara tidak langsung untuk mengendalikan inflasi, sedangkan kebijakan moneter yang bertujuan akhir pengendalian inflasi adalah kebijakan moneter yang dilakukan dengan mengendalikan penyebab inflasi
2. Kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam mengatasi laju inflasi adalah kebijakan moneter yang bertujuan langsung dan bertujuan antara dalam mengendalikan laju inflasi.
3. Semakin meningkatnya perekonomian (indikator PDB) terdapat kecenderungan semakin meningkat pula jumlah uang beredar dan laju inflasi. Pada tahun 1999 jumlah uang beredar di Indonesia jauh lebih banyak dari unit output, sehingga terjadi inflasi. Dampak dari kebijakan moneter yang berorientasi pengendalian inflasi adalah mengurangi jumlah uang beredar agar

tercapai kestabilan perekonomian, yaitu keseimbangan di sektor riil dan keseimbangan di sektor moneter.

4. Jumlah uang beredar serta naik turunnya tingkat suku bunga dapat berakibat pada perubahan laju inflasi di Indonesia. Sedangkan penyebab terjadinya inflasi dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran, dimana salah satu penyebabnya adalah jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga dan sebab-sebab yang lain. Sehingga kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebaiknya ditujukan langsung kepada penyebab inflasi (*inflation targeting*) seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, nilai tukar, hutang swasta dan hutang pemerintah terhadap pihak luar negeri, serta sebab-sebab lain di luar bidang moneter, seperti permasalahan di sektor riil.

6.2 Saran-saran

1. Pemerintah perlu mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar sebagai upaya mempertahankan laju inflasi.
2. Kebijakan ekonomi moneter yang diterapkan perlu mengalihkan sasaran akhirnya dari pengendalian jumlah uang beredar dan penentuan tingkat suku bunga kepada sasaran akhir berupa pengendalian laju inflasi (*inflation targeting*) sebagai upaya terpeliharanya stabilitas harga. Bank Indonesia sebaiknya membuat suatu kebijakan moneter yang bertujuan langsung kepada penyebab inflasi seperti pengendalian jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, nilai tukar, hutang swasta dan pemerintah terhadap pihak luar negeri, serta sebab-sebab lain di luar bidang moneter, yaitu permasalahan di sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dornbusch, Rudiger, 1998, *Macroeconomics*, Irwin McGraw-Hill, New York.
2. Elgar, Edward, 1996, *A Modern Guide To Macroeconomics*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.
3. Haz, Hamzah, dan Umar Basalim, 1993, *Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
4. Raghbendra, Jha, 1994, *Macroeconomics For Developing Countries*, Routledge, London and New York.
5. Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung, 2001, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, LPFE-UI, Jakarta.
6. Rosyidi, Suherman, 1998, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7. Samuelson, Paul A, 1997, *Makro Ekonomi*, terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
8. Sukimo, Sadono, 2002, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lampiran 1

PERSONALIA DAN ORGANISASI PENELITIAN

1. Kepala Proyek
 - a. Nama lengkap : Drs. Ec. Bustani Berachim
 - b. Gol/Pangkat/NIP : IVa / Lektor / 130 541 823
 - c. Jabatan fungsional : Dosen Tetap
 - d. Jabatan Struktural : --
 - e. Fakultas / Program Studi : Fak. Ekonomi/Ilmu Ekonomi Pembangunan
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 - g. Bidang Keahlian ; Ilmu Ekonomi
 - h. Waktu penelitian : 5 (lima) bulan
2. Susunan Tim Peneliti :
 - a. Nama anggota : Nurul Istifadah, S.E.
3. Tenaga lapangan / teknisi : ---
4. Pekerja lapangan/pencari data : ---
5. Tenaga administrasi : Ismail

Lampiran 2

RIWAYAT HIDUP KETUA PENELITI

1. Nama Lengkap : Drs. Ec. Bustani Berachim
2. Umur / Jenis kelamin / Agama : 55 tahun / Laki-laki / Islam
3. A l a m a t : Kedondong Lor IV / 16 Surabaya
4. Pangkat / Golongan / NIP : Lektor / IVa / 130 541 823
5. Jabatan sekarang : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
6. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4 Surabaya
8. Riwayat Pendidikan Tinggi : Fak. Ekonomi, Univ. Airlangga Surabaya
9. Pengalaman Penelitian :
 - a. Manfaat Pengembangan Tanaman Kenaf Untuk Serat Karung Bagi Petani Kecamatan Bungah kabupaten Gresik, Tahun 1989.
 - b. Analisa Masalah Tenaga Kerja dan Perkembangannya Pada Periode Pembangunan 1961 – 1989, Tahun 1989.
 - c. Analisa Pergeseran Struktur Ekonomi Dalam Kaitan Usaha Pembangunan Sarana Dan Pengembangan Industri Periode 1969 – 1986, Tahun 1990.
 - d. Perubahan Struktur Ekonomi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 1993.
 - e. Pekerja Wanita Di Perusahaan PMA (Suatu Studi Di Kotamadya Surabaya), Tahun 2000.
 - f. Analisa Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dengan Memakai Pendekatan SWP (Satuan Wilayah Pembangunan), 2001.

Lampiran 3

RIWAYAT HIDUP PENELITI

1. Nama Lengkap : Nurul Istifadah, SE
2. Umur / Jenis kelamin / Agama : 37 tahun / Wanita / Islam
3. A l a m a t : Klampis Semolo Barat III / i-10 Surabaya
4. Pangkat / Golongan / NIP : Penata Muda / IIIa / 132 205 435
5. Jabatan pokok : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
6. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4 Surabaya
8. Riwayat Pendidikan Tinggi :
 - a. Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 1993.
 - b. Jurusan Ilmu Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
9. Pengalaman Penelitian :
 - a. Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT/UIIDP) Dati I Jawa Timur, World Bank, 1988.
 - b. Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT/UIIDP) Kotamadya Surabaya, Bappeda Tk. II Kotamadya Surabaya, 1989.
 - c. Survey Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kotamadya Surabaya Tahun 1988, Bappeda Tk. II Kotamadya Surabaya, 1989.
 - d. Survey Potensi Masyarakat Kotamadya Surabaya Dalam Berbelanja Di Pusat-Pusat Perbelanjaan (Shopping Centre), 1990.
 - e. Pekerja Wanita Di Perusahaan PMA (Suatu Studi Di Kotamadya Surabaya), 2000.
 - f. Analisa Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dengan Memakai Pendekatan SWP (Satuan Wilayah Pembangunan), 2001.
 - g. Analisa Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kota Surabaya Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Keuangan, 2002.
 - h. Analisis Efektivitas Penggunaan Dana APBD Surabaya Dalam Menggerakkan Pembangunan Sektoral Di Surabaya Kajian Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah, 2003.
 - i. Pemberdayaan Pasar Swasta Tradisional di Kota Surabaya, 2004.